



Pusat Analisis Keparlemenan
Badan Keahlian Setjen DPR RI

REALOKASI ANGGARAN INFRASTRUKTUR KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM TAHUN ANGGARAN 2025

Suhartono

Analisis Legislatif Ahli Madya
suhartono2@dpr.go.id

Brigita Diaz Primadita

Analisis Legislatif Ahli Pertama
brigita.primadita@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Pemerintah melakukan realokasi anggaran infrastruktur antara Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) untuk Tahun Anggaran 2025. Realokasi anggaran ini bertujuan untuk menyinkronkan dengan prioritas program kerja Kabinet Merah Putih. Untuk Tahun Anggaran 2025, sebagian anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan dialokasikan ke Kementerian PKP meskipun belum disepakati besarnya. Total pagu anggaran Tahun 2025 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar Rp116,23 triliun di mana alokasi Ditjen Perumahan Kementerian PUPR sebesar Rp5,078 triliun. Saat ini, Kementerian PKP sendiri tengah mengajukan tambahan dana sebesar Rp48,4 triliun untuk mendukung program 3 juta rumah. Tambahan anggaran tersebut apabila disetujui akan meningkatkan kapasitas bantuan uang muka rumah subsidi dari 220 ribu menjadi 800 ribu unit.

Dengan keterbatasan anggaran, Kementerian PU melakukan *refocusing* anggaran dengan menghentikan sementara pembangunan infrastruktur baru berskala besar, seperti bendungan dan jalan tol. Anggaran Tahun 2025 akan dioptimalkan untuk membangun infrastruktur sumber daya air di dalam kerangka mewujudkan Asta Cita Swasembada Ketahanan Pangan, Air, dan Energi. Alokasinya akan diprioritaskan untuk pembangunan, revitalisasi, dan rehabilitasi jaringan irigasi serta optimalisasi bendung dan bendungan.

Mengacu Peraturan Menteri PUPR Nomor 14/PRT/M/2015 Tahun 2015, dari total luas daerah irigasi nasional 9,1 juta hektare, 6 juta hektare menjadi kewenangan pemerintah daerah dan 3,1 juta hektare pemerintah pusat. Pada tahun 2023, 50% jaringan irigasi yang menjadi kewenangan pemerintah daerah dan 10% jaringan irigasi yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dalam kondisi rusak. Revitalisasi jaringan irigasi diharapkan akan berdampak lebih cepat pada kemanfaatan untuk mendukung ketahanan pangan, air, dan energi dibandingkan dengan membangun infrastruktur baru. Revitalisasi jaringan irigasi merupakan bagian dari Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI). Dengan rerata biaya sebesar Rp5,2 juta/hektare, program tersebut cukup efisien dan efektif meskipun masih memiliki tantangan dalam transparansi pendanaan, penetapan lokasi, dan kurangnya sosialisasi di tingkat petani terkait tata kelola irigasi dan perubahan iklim, serta koordinasi antarkementerian/lembaga. Revitalisasi irigasi di daerah terpencil membutuhkan koordinasi lebih jauh dengan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal bersama dengan Kementerian Pertanian.

Fokus realokasi anggaran pada program optimalisasi fungsi bendung dan bendungan yang sudah terbangun juga akan lebih efisien dibanding membuat bendungan baru dengan biaya dan dampak lingkungan-sosial yang cukup besar. Peningkatan efektifitas juga bisa dilakukan dengan memperbaiki tata kelola pemeliharaan dan pengoperasian infrastruktur air yang sudah ada, antara lain melalui: 1) evaluasi dan revisi terhadap prosedur operasi yang

disesuaikan dengan pola cuaca yang berubah akibat perubahan iklim; 2) rehabilitasi fisik bendungan dengan pengerukan sedimen dari erosi di hulu bendungan; 4) penanganan kawasan tangkapan air; dan 5) pelatihan dan sosialisasi kepada pengelola serta masyarakat setempat. Sedangkan untuk mengejar disparitas sebaran lokasi bendungan terbangun, tampungan air skala lebih kecil seperti embung dapat menjadi solusi dikarenakan hanya sebagian wilayah Indonesia yang sudah memiliki ketahanan air melebihi 120 meter kubik per kapita per tahun. *World Commission on Dam* menyebutkan bahwa semakin kecil area tampungan maka akan semakin tinggi tingkat keberhasilan untuk memenuhi target penyuplaian air. Sebagai sumber pendanaan selain APBN, pemerintah diharapkan dapat meningkatkan inovasi pembiayaan infrastruktur yang menarik bagi investasi swasta. Sehingga, pemerintah perlu mengkaji alternatif skema pembiayaan secara mendalam sebelum diimplementasikan, termasuk potensi risiko yang akan muncul.

Pengamat infrastruktur, Nirwono Yoga, berpendapat selain fokus pada optimalisasi infrastruktur sumber daya air untuk mendukung ketahanan pangan. Kementerian PU juga tetap menaruh perhatian pada infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman dalam hal penyediaan air bersih, sanitasi, pembuangan sampah terpadu dan limbah. Kementerian PU memiliki sumber daya yang cukup dalam melakukan kajian dan menyiapkan kebijakan serta infrastruktur fisik dalam penyediaan air bersih, sanitasi, dan penataan lingkungan. Sinergi dan kolaborasi antar kementerian/lembaga serta pemerintah daerah menjadi salah satu kunci dari peningkatan kualitas hunian terutama untuk masyarakat miskin dan berpenghasilan rendah.

Atensi DPR

Pemerintah melakukan realokasi anggaran Kementerian PU dan Kementerian PKP tahun 2025. Untuk mewujudkan visi misi Asta Cita Swasembada Pangan, Air, dan Energi, Kementerian PU akan melakukan optimalisasi fungsi dari infrastruktur yang sudah terbangun, dan menanggukuhkan pembangunan infrastruktur baru berskala besar. Dalam fungsi pengawasan dan anggaran, Komisi V DPR RI perlu mendorong evaluasi dan keberlanjutan program pemerintah untuk revitalisasi sistem irigasi, program P3-TGAI, perbaikan dalam tata kelola infrastruktur air seperti bendung dan bendungan. Komisi V DPR RI dapat mendorong Kementerian PU untuk meningkatkan koordinasi dengan Kementerian Pertanian, Kementerian Desa PDT, BMKG, dan pemerintah daerah di dalam mengevaluasi dan memetakan secara komprehensif atas infrastruktur yang sudah ada untuk dioptimalkan fungsinya sehingga sejalan dengan prioritas Asta Cita. Selain itu, Komisi V DPR RI perlu mendorong inisiatif Kementerian PU dalam melakukan inovasi pembiayaan melalui skema kerjasama pemerintah dengan pihak swasta untuk mendukung anggaran infrastruktur.

Sumber

bbc.com, 21 November 2024;

idntimes.com, 17 dan 18 November 2024;

kompas.com, 19 November 2024;

kontan.co.id, 20 November 2024;

sindonews.com, 20 Oktober 2023.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

EDITOR

Polhukam

Prayudi
Novianto M. Hantoro
Ahmad Budiman
Rachmi Suprihartanti S.

Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q.
Sulasi Rongiyati
Suhartono
Venti Eka Satya
Dewi Wuryandani
Eka Budiyantri

Kesra

Yulia Indahri
Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.
Devindra R. Oktaviano

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake
M. Z. Emir Zanggi

Mohammad Teja
Nur Sholikhah P.S.
Fieka Nurul A.



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka_bkdprri

©PusakaBK2024